

Modalitas Visual Kartunis dalam Kartun Politik *Online* Pascareformasi

Ferry Darmawan

Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1, Bandung 40116
Email: ferrydarma_1@yahoo.com

Abstract: *The reform era is a new era for freedom of the press, including cartoonist, to freely express their ideas without being afraid of criminalization. Visual modality is the depiction chosen by cartoonist to reveal the truth. This research tries to analyze the visual modality of cartoonist to depict President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), in association with freedom of expression. Critical discourse analysis is conducted collaboratively with social semiotics to describe aspects of execution options within expression. The study reveals that in depicting SBY, the cartoonist are influenced by Hollywood movies and hold 'westernized' perspective that is free to criticize.*

Keywords: *critical discourse analysis, political cartoons, visual modality*

Abstrak: *Era reformasi merupakan era baru bagi kebebasan pers, dalam hal ini kartunis, untuk bisa bebas berekspresi tanpa dibayangi hukum pidana. Modalitas visual adalah bagaimana kebenaran diungkapkan kartunis dalam pilihan penggambarannya. Penelitian ini mencoba menganalisis modalitas visual kartunis dalam penggambaran Presiden SBY dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Melalui metode analisis wacana kritis yang dikolaborasi dengan semiotika sosial, penelitian ini bertujuan memaparkan aspek pilihan eksekusi dalam berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartunis dipengaruhi oleh film-film Hollywood dalam menampilkan Presiden SBY dan berisi perspektif 'kebarat-baratan' yang lebih bebas untuk mengkritik siapa pun.*

Kata Kunci: *analisis wacana kritis, kartun politik, modalitas visual*

Kehadiran media digital mengubah dunia dan cara kita berpikir tentang diri kita dan alam semesta. Secara khusus, budaya digital dikaitkan dengan kecepatan perubahan sosial dan transformasi teknologi dalam waktu singkat. Kita juga menyaksikan kelahiran budaya partisipasi yang memungkinkan masyarakat lebih terlibat dalam pembuatan dan penyebaran makna. Seorang tokoh posmodernisme, Keith Basset (dalam Creeber dan Martin, 2009, h. 5) mengungkapkannya demikian:

"... the rapid development of the New Media and computer technologies ... have the potential to transform the very nature of the public sphere and open up new channels of communication to a proliferation of new voices. The public intellectual of today must now be much more alive to the possibilities for participating in what could become a new 'cyberspace democracy' - an expanded public sphere which is less academic and less elitist, and demands the use of more accessible forms of language and discourse than those which intellectuals have become used to"

Berkembangnya media baru juga memperluas penggunaan media sosial sebagai sarana implementasi kebebasan berekspresi

masyarakat di era reformasi. Hal ini melahirkan budaya digital yang memungkinkan setiap orang bisa menyampaikan gagasannya secara langsung melalui media sosial dan tersebar ke penjuru negeri dalam waktu cepat. Pasca-Orde Baru, prinsip kebebasan pers di Indonesia menemukan wajah baru, misalnya dengan disahkannya UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang dengan jelas menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara.

Sejalan dengan perkembangan kebebasan pers, kebebasan berekspresi melalui media pun meluas. Bukan hanya media *mainstream*, media baru juga menjadi ladang berbagi informasi sebab mayoritas orang mendapatkan informasi melalui media ketimbang pengalaman pribadinya, termasuk masalah politik. Salah satu bentuk informasi mengenai politik dalam media yaitu kartun.

Periode reformasi telah mengalami beberapa pergantian pemerintahan, mulai presiden B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Periode SBY tercatat sebagai pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis dan memiliki aura penerapan nilai-nilai demokrasi lebih terbuka. Periode SBY juga merupakan pemerintahan pertama yang terpilih kembali secara berturut-turut dan memegang pemerintahan selama dua periode. Selain itu, selama periode kepemimpinan presiden SBY, kebebasan pers cukup terjamin. Bahkan, kartun politik yang banyak menampilkan kritik terhadap pemerintahan dan sosok SBY bisa bergerak bebas di media, baik media arus utama maupun media baru. Para kartunis pada masa pemerintahan SBY bisa berekspresi

dengan bebas melalui karya kartun politiknya.

Kritik *satire* dalam kartun dapat juga berupa kecenderungan yang tidak mengindahkan etika dan moralitas. Kebebasan yang dianut melalui karya kartun ini memicu beberapa kasus, seperti kasus koran mingguan Perancis *Charlie-Hebdo* pada 2007 yang memuat kartun Nabi Muhammad SAW dan memicu protes dari umat Islam di seluruh dunia (Fouché, 2007). Pengadilan setempat memenangkan mingguan itu dengan alasan aktivitas tersebut dilindungi oleh hukum kebebasan berekspresi dan tidak bermaksud menyerang komunitas Islam. Sebelumnya, harian Denmark, *Jyllands-Posten*, edisi 30 September 2005, membuat marah umat muslim di seluruh dunia dengan menampilkan dua belas gambar kartun yang dinilai menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Salah satu kartun menggambarkan Nabi tampil dengan sorban yang bentuknya mirip bom.

Di Barat, penggambaran kartun tidak berdampak hukum terhadap kartunisnya. Mereka (kartunis) diberi kebebasan untuk mengekspresikan gagasannya dalam bentuk gambar. Sebelumnya, di Amerika Serikat, awal 1900-an, sebuah media sayap kiri *The Masses* menampilkan kartun poster *Wanted* dengan *headline* "Reward" yang menggambarkan wajah Yesus Kristus dan di bawahnya tertulis "Dicari -untuk hasutan, kriminal anarkis, dan konspirasi menggulingkan pemerintahan". Jadi, menurut para kartunis ini, tindakan mereka merupakan salah satu bentuk kebebasan pers.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemuatan kartun, khususnya kartun politik, di media massa merupakan bagian dari bentuk komunikasi politik. Penggambaran tokoh politik dan sepak terjangnya dalam bentuk kartun merupakan bagian dari proses penyampaian pesan di ranah komunikasi visual.

Hal ini menjadi medan wacana bagi kebebasan pers. Pilihan seorang kartunis dalam mengeksekusi gambar kartun politiknya menjadi objek kajian penting. Kartun politik adalah gambar simbolik atau representasi, mengandung lelucon, humor, sindiran, dan satir. Isi kartun tersebut biasanya menyoroti pemerintahan atau kehidupan masyarakat pada umumnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa karikatur di media Barat (*political cartoon*) mempunyai kecenderungan kuat ke arah satir. Menurut Darminto (dalam Hadiyati, 2009, h. 72), satir itu menyindir atau mengkritik, tetapi muatan ejekannya lebih dominan. Bila tidak pandai memainkan, jurus ini bisa sangat membebani dan tidak mengenakan.

Pandangan dan amatan awal di atas mendorong peneliti mengungkap modalitas visual kartunis dalam mengeksekusi gambar kartun politik di media *online*. Modalitas adalah pendekatan semiotika sosial ke pertanyaan tentang kebenaran. Hal ini terkait dengan isu representasi: fakta *versus* fiksi, realitas *versus* fantasi, nyata *versus* buatan, otentik *versus* palsu, dan pertanyaan dari interaksi sosial. Pertanyaan tentang kebenaran juga merupakan masalah sosial. Hal yang dianggap benar dalam

satu konteks sosial tidak selalu dianggap benar pada konteks sosial lain dalam segala konsekuensinya. Menurut Leeuwen (2005), “*The concept of ‘modality’ is the key to studying how people use semiotic resources to create the truth or reality values of their representations, to communicate, for instance, whether they are to be taken as fact or fiction, proven truth or conjecture, etc*”.

Oleh karena itu, ahli bahasa dan semiotik tidak bertanya “*How true is this?*” tapi “*As how true is it represented?*”. Mereka tidak peduli dengan kebenaran mutlak, tetapi dengan kebenaran sebagai pembicara dan penulis atau produser tanda lain melihatnya, dan dengan sumber-sumber semiotika yang mereka gunakan untuk mengungkapkannya. Keduanya tidak selalu sepakat. Sangat mungkin untuk mewakili sesuatu yang tidak ada seolah-olah ada. Fiksi realis berkembang karena ini. Hal ini sama untuk mewakili sesuatu yang benar-benar ada atau telah ada, seolah-olah keberadaannya diragukan (Leeuwen, 2005). Jadi, istilah modalitas mengacu pada sumber-sumber semiotika untuk mengekspresikan “*as how true*” atau “*as how real*” representasi yang diberikan harus dipilih. Sumber-sumber modalitas membolehkan derajat dan jenis-jenis modalitas diekspresikan.

Semua sarana ekspresi visual bertingkat. Mereka memungkinkan dimensi relevan dari artikulasi untuk ditingkatkan atau diturunkan. Terlebih lagi, parameter yang berbeda dapat diperkuat atau dilemahkan pada tingkatan yang berbeda dan menghasilkan berbagai

kemungkinan konfigurasi modalitas. Konfigurasi ini merupakan isyarat penilaian pemirsa untuk modalitas, dari “seberapa nyata” gambar (atau bagian dari gambar) yang akan diambil. Fotografi sering dianggap sebagai reproduksi daripada mewakili kenyataan. Hal ini *inheren* dengan kebenaran dan dapat diandalkan karena sifat teknologinya. Gambar yang terbentuk pada foto bukan diproduksi oleh tangan fotografer, tetapi oleh alam, yaitu cahaya yang menerpa objek dan memengaruhi emulsi fotografi. Mengambil terminologi Peirce, tanda fotografi adalah “indeks”, yaitu tanda yang disebabkan oleh *referen*-nya. Misalnya, kartun di surat kabar cenderung memiliki penurunan artikulasi detail, latar belakang, kedalaman, cahaya, dan bayangan, dan tidak ada artikulasi dari gradasi warna dan tonal. Sebagai perbandingan, artikulasi dari parameter yang sama dalam foto-foto berita jauh diperkuat. Hal ini berhubungan dengan nilai modalitas mereka, yaitu kartun ditempatkan sebagai “opini” visual dan karenanya kurang faktual dibanding foto-foto berita yang diadakan untuk menyediakan kepercayaan melalui informasi dokumenter.

Berbeda dengan gambar digital yang dapat terlihat seperti foto, namun orang-orang, tempat, dan hal-hal yang mereka munculkan mungkin tidak pernah ada. Komputer pada dasarnya adalah sintesis dan bukan teknologi rekaman. Ia membentuk gambar berdasarkan informasi yang disimpan, yaitu informasi tentang bentuk-bentuk geometris dan tekstur permukaan dari orang, tempat, dan hal-hal yang akan diwakilinya. Mengikuti teknologi modalitas, kebenaran visual didasarkan

pada kegunaan praktis dari gambar. Gambar yang semakin dapat digunakan sebagai cetak biru atau alat bantu aksi, semakin tinggi modalitasnya. Banyak peta semacam ini. Begitu juga dengan pola untuk membuat pakaian, gambar arsitektur, atau instruksi untuk merakit barang sendiri. Konfigurasi modalitas yang sesuai akan cenderung menurunkan artikulasinya. Perspektif, misalnya, akan dikurangi menjadi nol karena *foreshortening* membuat sulit melakukan pengukuran gambar.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Metode ini dipakai untuk memahami modalitas visual kartun politik yang berupa tema atau ide pokok dari kartun politik sebagai isi utama dan konteks sebagai isi laten. Michael Foucault (dalam Eriyanto, 2003) menjelaskan bahwa studi *discourse analysis* bukan sekadar mengenai pernyataan, tetapi juga struktur dan tata aturan dari *discourse* (struktur diskursif) tersebut. Struktur diskursif adalah cara memberi makna struktur wacana yang saling berhubungan dalam wacana tertentu. Jika kita memberi makna terhadap teks-teks dalam struktur wacana, maka kita dihadapkan pada kesepakatan atas makna secara keseluruhan.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kritis, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian terhadap pembongkaran aspek-aspek tersembunyi di balik sebuah kenyataan yang tampak (*virtual reality*) guna dilakukannya kritik dan perubahan (*critique and transformation*)

terhadap struktur sosial. Pendekatan kritis beranggapan bahwa realitas yang dilihat merupakan realitas semu yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, dan nilai gender, serta telah terkristalisasi dalam waktu yang panjang. Pendekatan kritis juga melihat bahwa hubungan antara peneliti dan realitas yang diteliti selalu dijumpai oleh nilai-nilai tertentu. Realitas harus dipahami sebagai kenyataan yang telah diantari oleh nilai-nilai.

Pemahaman tentang semiotika sosial dipelopori oleh Hodge dan Kress (1998) dalam buku *Social Semiotics*, dan lebih jauh dijelaskan oleh Leeuwen (2005) dalam *Introducing Social Semiotics*. Fokus pada desain visual, mereka mengkaji teks dalam konteks yang terkait dengan sistem sosial yang melayani kepentingan ideologis dan dibingkai oleh hubungan kekuasaan. Peneliti menggabungkan keduanya karena metode CDA pada umumnya merujuk pada wacana teks verbal, sedangkan objek utama dari penelitian ini adalah kartun politik yang memiliki elemen-elemen visual yang harus dibaca dengan pendekatan visual.

Semiotika sosial menekankan bahwa modalitas “akhirnya bersumber pada kesepakatan sekelompok orang”. Menurut Hodge dan Kress, kelompok-kelompok sosial dan lembaga menentukan kebenaran mereka sendiri dan menghubungkannya dengan cara mereka sendiri untuk kebenaran orang lain (Leeuwen, 2005, h. 165). Namun demikian, teks kartun memiliki keterbatasan dalam menyampaikan wacana, dibanding dengan sebuah tulisan yang

secara panjang lebar dapat menjelaskan sesuatu. Oleh karena itu, kartun dianggap sebagai sebuah labirin yang mengundang para pembacanya untuk menemukan lorong keluarnya sendiri. Hal ini memicu para kartunis untuk menemukan cara bagaimana menyampaikan pesan secara komunikatif dan berbobot (tidak vulgar), namun tetap penuh humor yang selain lucu juga bisa memiriskan hati pembacanya.

Analisis wacana mempelajari penggunaan bahasa dalam teks visual tidak hanya melalui pendekatan struktural, tetapi juga penggunaan bahasa untuk berkomunikasi sebagai satu kekuatan bagi khalayak untuk melakukan tindakan atau keyakinan tertentu. Menurut Gee (dalam Albers, 2007, hal. 85), hal utama dalam *Visual Discourse Analysis* (VDA) adalah empat prinsip bahasa yang bekerja dalam analisis wacana. *Pertama*, bahasa visual adalah reflektif. Ia memiliki kapasitas untuk menciptakan dan merefleksikan konteks keberadaan bahasa visual itu dan merefleksikan realitasnya. Bahasa visual bekerja pada tataran pembaca mengenali konteks bahasa tersebut. Teks visual diciptakan untuk mengomunikasikan gagasan yang memiliki makna (*intertekstual*) lebih luas dibandingkan dengan bahasa tulis. *Kedua*, bahasa memungkinkan untuk dimaknai dalam konteks tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Makna dinegosiasikan dengan pembuat tanda, interaksi mereka dengan teks, dan percakapan lainnya. *Ketiga*, bahasa terdiri dari banyak bahasa sosial yang berbeda. Setiap bahasa sosial

menggunakan alat atau media berbeda yang digunakan untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan yang diinginkan. Karena teks-teks visual telah disebut “karya seni” oleh sejumlah literatur, peneliti sastra, akademikus, dan pendidik, bahasa visual telah menjadi “hibridisasi”. *Keempat*, teks-teks visual tersebut juga mengandung unit analisis, di antaranya struktural, semantik, artistik, *taktil* (sentuhan atau rabaan), dan visual. Kurangnya pemahaman terhadap unit analisis ini membuat teks visual terlihat baku, tanpa sensor, dan sebagian besar tidak bisa dipahami.

Kress dan Leeuwen (2006) menggunakan istilah “partisipasi” untuk menggantikan istilah “objek” atau “elemen” dalam wacana. Menurut mereka, ada dua tipe partisipan yang terlibat dalam setiap tindak komunikasi visual, yaitu partisipan interaktif dan partisipan representatif (yang mewakili). Partisipan interaktif adalah partisipan dalam tindak komunikasi, yaitu partisipan yang berbicara dan mendengarkan, menulis dan membaca, atau membuat gambar dan melihatnya. Sedangkan partisipan representatif adalah partisipan yang merupakan objek komunikasi, yaitu orang-orang, tempat, dan hal-hal (termasuk hal abstrak) yang diwakili melalui percakapan, tulisan, atau gambar. Hubungan antarpartisipan dalam objek wacana merupakan struktur diskursif.

HASIL

Kartun politik *Inilah.com* dibuat berdasarkan isu yang sedang hangat. Ide pembuatan kartun dimulai dari meja

redaksi dan diserahkan kepada kartunis, meskipun tetap berada dalam pengawasan pemimpin redaksi. Kartunis dibebaskan untuk membuat gambar kartun sesuai topik yang akan ditayangkan. Namun, tanggung jawab terbit atau tidaknya kartun tersebut berada di tangan pemimpin redaksi. Keputusan kartunis mengenai bentuk visual kartun dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengetahuan politiknya. Misalnya, kartunis Fonda Lapod, dengan latar pendidikan Ilmu Jurnalistik dan cukup lama terjun di dunia politik dengan kartun-kartunnya, menciptakan beberapa kartun politik yang kontroversial. Tokoh kartun yang menjadi sorotan Fonda adalah para pengambil keputusan tertinggi negara, seperti presiden, perdana menteri, dan para politisi senior.

“Berbeda dengan jurnalis tulis yang menyampaikan sikap melalui berita tulis, sebagai kartunis menyampaikan sikap melalui gambar kartun. Jelas yang dijadikan objek adalah tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pengambil keputusan, karena itu yang menarik” (wawancara dengan Fonda Lapod, 6 Desember 2015).

Fonda merasa bahwa kartunis, dengan gaya kartun *digital tracing*, adalah profesi dalam suatu industri media yang dituntut profesional, sehingga *skill individual* menentukan eksekusi gambar kartun. Berbeda dengan karya-karya Dendri, kartunis yang memilih penggambaran kartun dengan teknik manual, sehingga kartun tersebut memiliki keterbatasan untuk dipahami oleh pembaca, seperti dianggap kurang mirip atau tidak mewakili tokoh yang digambarkan. Namun demikian, ia berusaha menampilkan ciri-ciri tokoh yang

digambarkan melalui penonjolan karakter tokoh.

Kartun Lapod dibuat untuk mewakili opini redaksi atau kartunis. Ia memiliki ciri khas telinga lebar, hidung besar (mancung), dan kicauan yang kritis dan sinis. Penggambaran telinga lebar dan hidung mancung memiliki makna konotasi bahwa Lapod adalah perwakilan rakyat yang selalu mampu mendengar dan mencium ketimpangan kehidupan politik dan menjadi *watchdog* bagi pemerintah. Lapod pun menjadi *trademark* bagi kartun politik *Inilah.com* setiap edisinya.

Kartunis, dalam menghadirkan realitas politik terkait SBY menggunakan dua teknik penggambaran, yaitu *digital tracing* dan *analog-digital*. Kartun yang dibuat dengan teknik *analog*, cenderung menghasilkan karikatur yang tidak mirip dengan tokoh yang dimaksud. Berbeda dengan teknik *digital tracing* yang menghasilkan gambar karikatur yang bisa menyerupai tokoh yang diwakili. Pemilihan teknik *digital tracing* dalam penggambaran karikatur SBY merupakan modalitas visual

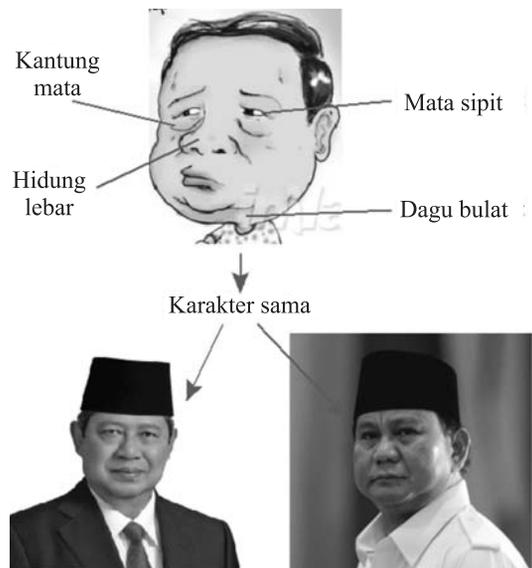


Gambar 1 Tokoh Lapod Digambarkan dengan Telinga Lebar dan Hidung Mancung

Sumber: Dokumentasi penulis

kartunis untuk menghadirkan kebenaran. Karikatur yang dibuat dengan *digital tracing* merupakan modalitas tinggi karena derajat kemiripannya mendekati foto. Pembaca pun bisa mengetahui siapa tokoh yang digambarkan, meskipun tidak ada keterangan berupa label/penamaan pada karikturnya.

Penggambaran karikatur dengan teknik manual adalah modalitas rendah. Kartunis membutuhkan keahlian khusus untuk meriset tokoh agar mampu menonjolkan ciri khas figur dalam kartunnya, sehingga pembaca bisa mengenali dan membedakannya dengan figur lain. Oleh karena itu, kartunis *Inilah.com* menampilkan karakteristik tertentu pada tokoh yang digambarkan untuk memberi petunjuk bagi pembaca agar mengenali siapa tokoh yang digambarkan, meskipun ciri-ciri yang digambarkan bisa memiliki persepsi berbeda dari pembacanya.



Gambar 2 Gambar Kartun Memiliki Persepsi Berbeda terhadap Tokoh yang Digambarkan

Sumber: Olahan peneliti

PEMBAHASAN

Representasi menjadi tahap awal deskripsi kartun politik untuk menganalisis modalitas visual kartunis. Gambar kartun politik merupakan bentuk penggambaran realitas dalam perspektif kartunis berdasarkan pengalamannya. Setelah itu, modalitas visual kartunis diungkapkan sebagai sarana pencarian kebenaran. Kartunis menggunakan aspek-aspek kognitifnya untuk mengeksekusi gambar kartun politik. Pada artikel ini, beberapa kartun dipilih sebagai sampel penelitian secara purposif. Kartun pertama berjudul “Semrawutnya Peradilan Kita” (gambar 3) yang diterbitkan pada 16 Juni 2008. Kartun ini dilatarbelakangi oleh kasus yang melibatkan Artalyta Suryani (Ayin) terkait suap untuk jaksa Urip Tri Gunawan atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat itu, berita juga membahas kedekatan Ayin dengan SBY karena pemutaran rekaman percakapan Ayin di pengadilan yang sempat menyebut nama SBY.

Kartun ini menggambarkan sosok SBY yang mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah sedang tersenyum. Pandangan matanya terlihat ke depan, tetapi tak tentu arah. Di pundaknya, tergambar seorang perempuan ber-*make-up* tebal, bergaun seksi, dan bersepatu hak tinggi warna merah sedang melirik ke arahnya. Kartunis menampilkan tokoh perempuan itu seperti wanita penghibur kelas tinggi. Hal ini berelasi dengan teks informasi, “*Mr. President & Pretty ‘Ayin’ Woman*”. Tokoh Lapod digambarkan menolehkan kepala sambil tersenyum simpul dan berkata, “*No Woman No Trouble*”. Ayin dan SBY digambarkan dengan tanda gerakan.



Gambar 3 Semrawutnya Peradilan Kita (Fonda Lapod)

Ket: PR=Partisipan Representasi; PI=Partisipan Interaktif; MBR=Modalitas Bahasa Rendah
Sumber: Olahan peneliti

Kartun ini memuat tiga partisipan, yaitu SBY dan Ayin sebagai Partisipan Representatif dan Lapod sebagai Partisipan Interaktif. SBY dan Ayin merupakan tokoh yang sedang diberitakan. SBY sebagai “*Mr. President*” dan si wanita sebagai “*Pretty ‘Ayin’ Woman*”. Kartunis mencoba menggambarkan kedekatan kedua tokoh tersebut dengan kalimat Lapod yang mempertanyakan “*No Woman No Trouble?*”. Posisi kartun wanita yang berada di pundak SBY berkonotasi bahwa peran SBY sebagai pelindung Ayin merupakan beban baginya. Relasi antara tatapan mata Ayin yang melirik ke SBY dan SBY memandang ke arah lain menunjukkan bahwa SBY tidak peduli dengan Ayin. Tanda gerakan di sekitar tubuh Ayin bermakna Ayin berusaha “mendekatkan diri” kepada SBY, sedangkan tanda gerakan di sekitar wajah SBY bermakna SBY menghindar.

Informasi teks yang ditampilkan sebagai pendukung kartun bisa digunakan sebagai pengganti *labeling*, namun tidak

menjelaskan hal yang sedang dibicarakan. Wajah SBY, dengan teknik *digital tracing*, sangat bisa dikenali. Makna konotasi dari kata *Pretty Woman* mengingatkan pada judul film yang dibintangi Richard Gere dan Julia Roberts. Namun, apakah realitas yang diwakilkan sama dengan makna *pretty woman* dalam film? Ide kartun ini tidak terlihat jelas maknanya, meskipun gambar yang ditampilkan sudah sangat jelas. Pembaca harus memperhatikan berita tulis yang terkait dengan kartun ini untuk memahami maksud kartunis. Tokoh Lapod yang menjadi partisipan interaktif melakukan tindak komunikasi dengan pembaca, meskipun kalimat yang diucapkannya menjadi tanda tanya juga bagi pembaca.

Kartun kedua berjudul “*Grasi Pidana Narkoba, Tak Ada Efek Jera?*” (gambar 4) yang terbit pada 23 Juni 2012. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh grasi SBY kepada terpidana kasus narkoba, Corby dan Franz Grobmann, yang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efek jera bagi pelaku narkoba.

Kartun ini menggambarkan SBY sedang membawa kotak bertuliskan “*Grasi Narkoba*” dan di dalamnya terdapat kertas. Di tangan kanannya, ada kertas bertuliskan “*Grasi*”. Kartunis juga menuliskan “*Grasi... Grasssiii...*”, yaitu kata yang diucapkan kartun SBY. Kegiatan SBY memiliki konotasi pekerjaan pedagang asongan di pinggir jalan raya. Di belakangnya terdapat gambar dua orang pria. Orang pertama mengenakan seragam polisi dan orang kedua berambut pirang sedang tersenyum



Gambar 4 Grasi Pidana Narkoba, Tak Ada Efek Jera?

Ket: PR=Partisipan Representasi; PI=Partisipan Interaktif; MBT=Modalitas Bahasa Tinggi

Sumber: Olahan peneliti

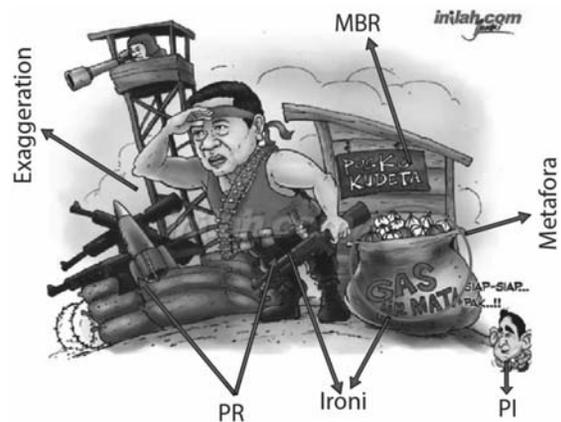
lebar dengan tangan diborgol. Teks berbunyi “*Tersangka Kasus Narkoba*”. Keduanya berkonotasi tertangkapnya pelaku kejahatan dengan tersangka dari negara asing. Secara keseluruhan, kartun politik ini lebih didominasi oleh teks verbal, sehingga terlihat seperti komik. Sementara itu, tokoh Lapod, sambil melipat tangan di dada, mengatakan “*Dimana efek jeranya para pelaku narkoba?*”.

Partisipan representatif dalam kartun ini adalah SBY dan seorang polisi yang sedang menangkap warga negara asing. Ketiga orang tersebut terkait pemberian grasi kepada terpidana narkoba oleh SBY yang menjadi objek pemberitaan. Lapod, sebagai partisipan interaktif, melakukan tindak komunikasi dengan mempertanyakan kebijakan SBY tentang grasi tersebut. Penggambaran SBY dengan teknik *digital tracing* membuat karikatur SBY seperti lukisan, mirip dengan aslinya. SBY digambarkan seperti pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Hal ini mengonotasikan sangat gampangya SBY mengeluarkan

grasi untuk para pelaku kejahatan narkoba. Ekspresi ide dan penggambarannya cukup menarik. Kartunis menggunakan gaya ironi dengan menggambarkan SBY dan polisi yang menangkap warga negara asing. Kebebasan pers yang bertanggung jawab dimunculkan dengan penggambaran “jualan grasi”, sehingga pesan sangat mudah ditangkap pembaca. Hal ini menandakan bahwa kartunis melakukan riset dengan baik.

Kartun ketiga berjudul “Kudeta Pemerintahan SBY” yang terbit pada 19 Maret 2013. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga komoditas bawang merah dan bawang putih yang membuat masyarakat resah. Harga kedua komoditas tersebut menjulang tinggi hingga mencapai harga yang tidak masuk akal. Di tengah-tengah kenaikan harga tersebut, SBY melakukan jumpapers dengan menyebutkan bahwa, menurut informasi intelijen, akan terjadi kudeta terhadap pemerintahannya pada 25 Maret 2013.

Kartun ini menggambarkan karikatur SBY mengenakan seragam tentara dengan ikat kepala biru. Di badannya, terdapat amunisi dan senjata lengkap. SBY tampak sedang melakukan pemantauan. Di belakangnya, terdapat gubuk bertulis “Posko Kudeta” dan menara pengintai dengan seorang tentara sedang meneropong. Berbagai senjata perang, kawat berduri, hingga roket tersedia di sekitar lokasi. Penggambaran dengan pendekatan *exaggeration* (berlebih-lebihan) digunakan kartunis untuk menggambarkan tindakan SBY dalam menerima laporan intelijen



Gambar 5 Kudeta Pemerintahan SBY

Ket: PR=Partisipan Representasi; PI=Partisipan Interaktif; MBR=Modalitas Bahasa Rendah
Sumber: Olahan peneliti

tentang isu kudeta pemerintahan dirinya. Di samping SBY, terdapat karung bertuliskan “Gas Air Mata”, namun berisi bawang merah dan bawang putih. Relasi antara SBY dengan karung bawang merupakan penggambaran kartunis melalui pendekatan ironi. Atas perilaku SBY tersebut, tokoh kartun Lapod berkomentar “Siap-Siap... Pak..!!”.

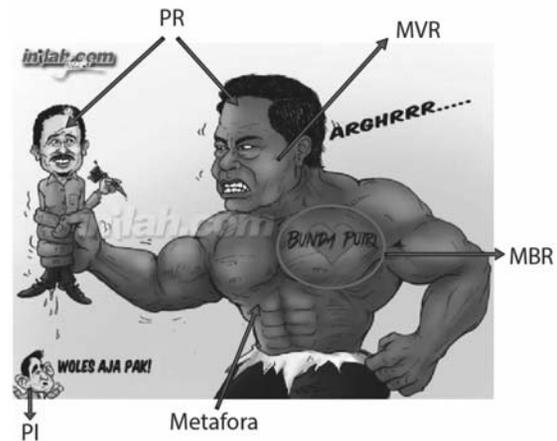
Partisipan representatif dalam kartun ini adalah SBY. Kartun ini meluncurkan ide kepanikan SBY menghadapi isu kudeta. SBY digambarkan bersenjata lengkap, seolah-olah sedang menghadapi perang. Kartun Lapod hadir sebagai partisipan interaktif yang mengomentari hal tersebut. Sementara itu, sekarang bawang bertuliskan “Gas Air Mata” merupakan partisipan representatif lain yang melakukan tindak komunikasi terhadap pembaca. Tujuannya untuk menjelaskan isu yang terjadi. Relasi antara partisipan interaktif dengan partisipan representatif adalah penegasan terhadap isu yang diangkat. Penggambaran tokoh SBY yang tidak menggunakan *digital tracing* membuat tingkat kemiripan tokoh

rendah. Namun, kartunis memberikan ciri-ciri khusus terhadap SBY, yaitu kantung mata yang tebal, pipi gemuk, dan hidung besar.

Kartun ini penuh dengan sensasi, ide *lebay*, berlebihan, *melodramatis*, dan merupakan tipe kartunis generasi *Hollywood*. Meskipun demikian, wacana visual yang ditampilkannya mudah dipahami. Isu kudeta dianggap oleh kartunis sebagai strategi pengalihan isu. Kartunis menggambarkannya melalui karung berisi bawang merah dan bawang putih bertuliskan “*Gas Air Mata*” yang merupakan metafora kesusahan masyarakat akibat naiknya komoditi tersebut.

Kartun keempat berjudul “*SBY marah 2000%*” yang terbit pada 12 Oktober 2013. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan suap kuota daging sapi impor yang melibatkan Lutfi Hasan Ishaq (LHI), mantan presiden PKS. LHI, pada saat memberi kesaksian di pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa Ahmad Fathonah pada 2013 lalu, mengatakan “*Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat Presiden SBY, dan Bunda Putri sangat tahu informasi mengenai kebijakan resuffle kabinet*”. Mendengar kesaksian tersebut, SBY segera melakukan jumpa pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara. SBY, dengan nada marah, mengatakan “*Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden. 1000 persen Luthfi bohong. Saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan tidak ada kaitan dengan saya*”.

Kartun ini menggambarkan karikatur SBY berubah menjadi *Hulk* dengan *tattoo* gambar hati dan bertuliskan “*Bunda Putri*”.



Gambar 6 SBY Marah 2000%

Ket: PR=Partisipan Representasi; PI=Partisipan Interaktif; MBR=Modalitas Bahasa Rendah; MVR=Modalitas Visual Rendah
Sumber: Olahan peneliti

Putri” di dadanya. Makhluk raksasa hijau itu, dengan mimik muka marah, sedang menyengkeram tokoh mirip LHI yang sedang memegang pena jarum pembuat tato. Di bagian sudut bawah, kartun Lapod berkomentar “*Woles Aja Pak!*”.

Partisipan representatif dalam kartun ini adalah SBY yang dimetaforakan sebagai *Hulk* dan LHI yang ada di cengkeramannya. Kartun tersebut juga menggambarkan bahwa SBY dibuat marah oleh LHI karena membuat tato “*Bunda Putri*” dan simbol hati. Kemarahan SBY diibaratkan *Hulk* dengan filosofi bahwa diri setiap manusia memendam sifat *Hulk*. *Hulk* adalah makhluk raksasa hijau yang bermula dari sosok manusia biasa dan berubah menjadi raksasa jika hatinya sedang gundah atau marah. Penggunaan unsur analogi kemarahan SBY dieksekusi oleh kartunis dengan memilih tokoh *Hulk* sebagai representasi reaksi SBY ketika mendengar pernyataan LHI mengenai sosok “*Bunda Putri*”. Ini mengonotasikan bahwa LHI

menyinggung kedekatan SBY dan “*Bunda Putri*” layaknya sepasang kekasih. Kasus LHI yang dikenal dengan korupsi “*Daging Sapi*” ini menyinggung orang nomor satu di Indonesia saat itu.

Kartun Lapod sebagai partisipan interaktif memberikan opini dengan teks “*Woles Aja Pak!*” (*woles* = santai). Kartunis juga menggunakan pendekatan ironi untuk mengungkapkan jiwa demokrat dalam diri SBY yang menyikapi pernyataan LHI tersebut. Hal ini terkait dengan sikap SBY yang langsung mengadakan jumpa pers saat menyikapi pernyataan LHI itu.

Pada praktik diskursif, kartun ini menggunakan teknik analog. Kemiripan tokoh LHI dengan aslinya memiliki derajat lebih tinggi dibanding tokoh SBY. Namun, ide dan gambarnya tidak memberikan informasi yang mudah dipahami. Gambar tidak memberikan tanda-tanda yang bisa menjelaskan makna kartun tersebut. Realitas kemarahan SBY terhadap LHI dibuat dengan metafora filosofi *Hulk*. Kebebasan pers disalahgunakan dengan membuat gambar kartun yang minim informasi dan susah dimaknai pembaca.

PENUTUP

Perhatian pada relasi antara isu dan gambar yang ditampilkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap modalitas visual kartunis. Pada kartun pertama, kartunis menggambarkan kartun bergenre poster. Informasi dalam kartun minim dan hanya menampilkan karikatur SBY bersama seorang perempuan bernama Ayin. Judul kartun besar layaknya sebuah

poster film dan kartunis menuliskan “*Pretty Woman*” yang konotasinya merujuk pada sebuah film *Hollywood* yang menceritakan hubungan antara seorang pejabat dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang disewa sebagai sekretaris pribadinya dan berakhir dengan kisah romantis.

Penggambaran yang bergenre poster film itu dapat dimaknai sebagai kebenaran yang diungkap kartunis tentang adanya aktor dan aktris dalam kasus tersebut. Adanya keterkaitan seorang pejabat negara terhadap kasus suap seorang wanita yang ‘bukan siapa-siapa’, membuat kasus ini menjadi ‘apa-apa’. Namun, kartun ini menarik karena kalimat “*Pretty Woman*” yang menjadi modalitas bahasa kartunis dan penggambaran Ayin yang layaknya seorang “*Pretty Woman*”, atau dalam bahasa Indonesia adalah PSK.

Pada kartun kedua, kartunis menggambarkan kartun dengan genre komik. Informasi kartun dalam wujud gambar dan teks saling mendukung. Pesan yang ingin disampaikan kartunis tergambar dengan baik dan mudah dicerna. Sindiran terhadap sikap keputusan grasi SBY dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan warga negara asing dianalogikan dengan ‘menjual’ atau ‘barang dagangan’. Kebenaran yang ingin diungkap kartunis adalah begitu mudahnya grasi yang merupakan hak prerogatif presiden diberikan, layaknya pedagang asongan yang mudah ditemui di mana saja.

Pada kartun ketiga, informasi dalam kartun mudah dipahami karena kartunis menggambarkan isu tersebut dengan gamblang. Pemilihan situasi perang, posko

kudeta, gas air mata, dan penggambaran bawang merupakan kebenaran yang ingin diungkapkan kartunis terkait relasi seluruh partisipan, yaitu pengalihan isu. Penampilan SBY dalam balutan *ala Rambo*, seorang pahlawan perang *Hollywood*, adalah suatu ironi terhadap situasi sebenarnya masyarakat.

Pada kartun keempat, penggambaran isunya tidak mudah dipahami. Kartunis melakukan *prejudice* terhadap konferensi pers SBY terkait ucapan LHI mengenai keterkaitan SBY dengan Bunda Putri. Penggambaran *Hulk*, tokoh superhero *Hollywood*, untuk mewakili SBY yang sedang marah merupakan modalitas visual yang dipilih. Kartunis kembali menggunakan citra seorang pahlawan yang penuh penderitaan, seperti halnya sosok *Rambo* pada kartun ketiga, sehingga citra yang ditampilkan memersuasi pembaca untuk mencari kebenaran atas tindakan SBY tersebut.

Berdasarkan keempat kartun tersebut, simpulan mengenai modalitas visual kartunis adalah sebagai berikut: 1) kartunis dipengaruhi film-film *Hollywood* dalam menampilkan gambar kartun SBY untuk mengungkapkan kebenaran isu yang dimunculkan dalam kartun, 2) kebebasan dalam mengekspresikan perilaku/kebijakan pemerintahan SBY melalui kartun mengandung perspektif ‘kebaratan’ yang bebas mengkritik siapa saja. Penggambaran seorang presiden yang merupakan simbol negara melalui berbagai karakter, seperti hubungannya dengan “*Pretty Woman*”, pedagang asongan, tentara yang “*lebay*”, atau raksasa hijau pemarah, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Albers, P. (2007). Visual discourse analysis: An introduction to the analysis of school generated visual texts (online). Dalam *56th Yearbook of the National Reading Conference*. Oak Creek, USA: National Reading Conference
- Creeber, G. dan Martin, R. (2009). *Digital cultures*. England, UK: Open University Press.
- Eriyanto. (2003). *Analisis wacana*. Yogyakarta, Indonesia: LkiS
- Fouché, G. (2007, Februari 7). Cartoon court case begins. *theguardian.com*. < <http://www.theguardian.com/media/2007/feb/07/pressandpublishing.france>>
- Hadiyati (2009). *Analisis pragmatik humor Nasruddin Hoja*. Skripsi. Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Hodge, R dan G. Kress. (1988). *Social semiotics*. New York, USA: Cornel University Press
- Kress, G. dan Leeuwen, T. (2006). *Reading images -the grammar of visual design*. (2nd ed). NY, USA: Routledge.
- Leeuwen, T. (2005). *Introducing social semiotics*. London, UK: Routledge.

